

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAHAN PROGRAM KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA

*(Suatu Studi Analisa Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung
Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen)*

Oleh

GLEND A. BAYOA

Abstrak

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga akar rumput, LKMD/k, PKK, dan Karang Taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Penggiat pemberdaya masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Dalam berbagai literatur, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diinterpretasikan bermacam-macam, diantaranya: "Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya" (Upholf, 1992). "Partisipasi adalah suatu proses dimana sebagai pelaku (stakeholders) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka." (Bank Dunia, 1994).

Dari intepretasi diatas dapat ditarik garis besarnya yang kesemuanya menekankan tentang hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Artinya bahwa masyarakat memiliki hak hak untuk berperan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dari pembangunan itu sendiri.

Secara sederhana partisipasi adalah alat untuk mewujudkan pengaruh dari individu/kelompok yang selama tidak dianggap/diperhitungkan dalam perumusan serta penetapan kebijakan publik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan, dengan alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari keduanya menyebabkan secara alamiah akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan laki-laki dan perempuan. Hal lain yang

juga menjadi perbedaan adalah kewajiban-kewajiban yang lahir dari sebuah proses sosial beserta konsekuensi dari keduanya. (Yuliati Y. 253:254).

Perbedaan laki-laki dan perempuan melahirkan diskriminasi atau ketidakadilan, yang satu lebih dominan dari pada yang lain. Realita ini mengundang perhatian berbagai kajian yang menarik salah satunya, kulture yang memberikan pandangan bahwa anatomi dan fungsi dari semua bagian tubuh laki-laki dan perempuan akan berkonsekuensi pada berbagai psikologisnya, yang mana perempuan lebih banyak memiliki tugas domestic untuk mengurus segala urusan rumah tangga, sedangkan berbeda dengan laki-laki yang dipersiapkan mandiri dengan peran yang lebih besar pada berbagai aspek. Asumsi ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam keluarga, berbangsa dan bernegara.

Isu kesetaraan gender mulai menjadi bagian dari agenda perubahan sosial dan politik sejak tahun 1977. Berawal dari London (Inggris) para aktivis Feminisme mulai berjuang memperkoralakan isu kesetaraan gender. Perjuangan terhadap kesetaraan gender kemudian diikuti oleh Negara-negara di dunia sehingga kemudian menjadi bagian dari wacana global mutakhir.

Merujuk pada Women's Studies Encyclopedia, istilah gender merupakan konsep cultural yang berusaha menjelaskan perihal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat. Dengan demikian, pemaknaan terhadap gender merupakan konstruksi budaya. Maka dari itu konsep gender dianggap bisa berubah mengikuti perkembangan zaman.

Perlu dijelaskan bahwa istilah gender tidak sepadan dengan dengan seks. Dalam transliterasi Bahasa Indonesia, istilah gender sering disamakan dengan seks, sehingga kemudian melahirkan pemahaman yang agak berbeda. Padahal gender adalah sebuah konstruksi pemahaman yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dengan system sosial dan budaya tertentu. Misalnya masyarakat Papua, justru kaum laki-laki lebih dominan dari perempuan.

Persoalan-persoalan gender menjadi urgen untuk diperjuangkan karena dampaknya pada ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Misalnya dalam konteks masyarakat yang menganut system sosial dan budaya patriarkhi, kaum perempuan tidak mendapat hak-hak yang selayaknya. Oleh karena itu, para aktivis Feminisme sebenarnya sedang menggugat system sosial dan budaya patriarkhi.

Perjuangan para aktivis Feminisme menghendaki terwujudnya keadilan sosial dengan menempatkan peran dan posisi kaum perempuan sesuai dengan hak-haknya. Landasan para aktivis Feminisme menurut keadilan berdasarkan prinsip humanism universal, yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling fundamental yang melampaui etnik, budaya dan agama.

Di Indonesia, gerakan Feminisme sudah merambah ke wilayah politik. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Secara perlahan-lahan, gerakan Feminisme menuntut kesetaraan kaum perempuan di Indonesia untuk mendapat hak-hak di bidang sosial dan budaya. Namun lambat laun, seiring dengan berulirnya reformasi (1998), gerakan Feminisme mulai merambah wilayah politik. Sebab berdasarkan catatan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi perempuan sangat minim di pentas politik. Padahal, jumlah kaum perempuan lebih mendominasi dari kaum laki-laki di Indonesia. Wajar jika kaum perempuan menuntut kesetaraan di bidang politik (kekuasaan).

Cara laki-laki yang berkuasa dalam menerjemahkan program terhadap perempuan rawan salah sasaran. Sebab sudut pandang yang melekat pada laki-laki terhadap perempuan berbeda-beda. Kadar sensitivitasnya lebih tipis jika di banding perempuan sebagai pihak yang mengalami.

Wajah kepemimpinan laki-laki juga rawan menjadikan perempuan sebagai objek kebijakan. Perempuan hanya dipaksa menjalankan program, tanpa ditanyakan skala prioritas dan kebutuhan. Program yang diciptakan bisa saja asal menyesuaikan alokasi anggaran.

Dalam implementasi kebijakan, perempuan selalu dijadikan subjek, sehingga selalu diajak berpartisipasi memberikan masukan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penentuan program yang sesuai dengan kepribadiannya. Pendekatan keijakan dari atas ke bawah dihilangkan dengan mengajak yang bawah sebagai bagian pengambil kebijakan yang di atas.

Sejak reformasi bergulir di Indonesia pendekatan partisipatif semakin populer dalam perencanaan dan pengelolaan masalah public, berbeda dengan pendekatan masalah konvensional yang sebelumnya cenderung telenokratis, pendekatan partisipatif lebih mengutamakan keputusan bersama diantara stakeholder yang terlibat. (Diana Son dkk: 2003:63). Perempuan sebagai instrument pencapaian tujuan bersama dan mediasi dalam urusan publik.

Dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya mengembangkan setiap daya yang ada melalui upaya-upaya pemberdayaan, salah satunya adalah mengoptimalkan potensi kaum perempuan menjadi sebuah energi khususnya dalam proses perumusan kebijakan publik.

Sedikitnya ada empat actor dalam proses perumusan kebijakan publik yakni golongan rasional, golongan teknisi, golongan intermentalis dan golongan reformis. (Carles.O.V. dalam Abdul. S. 1997:29). Yang mana keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan publik digolongkan dalam tipe rasionalis.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa/kampung tidak terlepas dari berbagai komponen masyarakat sebagai sebuah proses sosial termasuk kelompok masyarakat yang lahir karena sifat dasar manusia yang selalu ingin hidup bersama dengan sesama dan alam sekitarnya. Keinginan itu yang kemudian melalui kaum kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Diantara mereka ada hubungan timbal balik yang erat antara satu dengan yang lainnya. Kelompok sosial di kampung yang tergolong teratur adalah kelompok yang keberadaannya telah lama dan mempunyai pola tertentu. Seperti kelompok tim penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) kelompok ini ada di seluruh desa/kampung sebagai subsistem dari pemerintah secara struktural dari pusat daerah sampai ke kampung-kampung (pedesaan).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa ini dibentuk demi mengubah paradigma klasik terhadap peranan kaum perempuan yang ganda dalam keluarga, selain sebagai ibu rumah tangga juga dituntut untuk mengurangi beban keluarga. Sektor domestic dan sektor publik sejalan dengan rumusan rakernas VII PKK Tahun 2005 bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan Indonesia yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera di kampung menawi?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

- a. Partisipasi perempuan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan program keluarga dan masyarakat sejahtera.
- b. Bagaimana cara pemerintah menanggapi partisipasi perempuan dalam mengimplementasikan kebijakan program keluarga dan masyarakat sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah;

a. Manfaat ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teori dan pemecahan masalah menyangkut partisipasi perempuan dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak dan yang berkepentingan dalam proses implementasi kebijakan khususnya partisipasi perempuan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Partisipasi

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai kapasitas seseorang dalam upaya-upaya yang menentukan bagi kualitas hidup yang dijalaninya. Adjid (1985), mengartikan partisipasi sebagai kemampuan masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga masyarakat

tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), pengertian partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pengertian partisipasi lainnya dijelaskan oleh Sayogyo (1998) sebagai peluang ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan serta peluang ikut menilai hasil pembangunan. Dalam uraiannya yang lain, Sajogyo (2003) menjelaskan partisipasi sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya. Menurutnya, itulah arti partisipasi yang tuntas, artinya dimana membangun partisipasi mencapai puncaknya dalam upaya pemberdayaan. Dalam literatur lain, FAO (1989) dalam Mikkelsen (2001) menerangkan bahwa

- Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka

Dalam argumen efisiensi, Cleaver mengatakan bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka (Cleaver, 2002 dalam Cooke & Kothari, 2002:37).

Korten (1988), menjelaskan partisipasi adalah proses pemberian peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan Migley (1986), menjelaskan partisipasi sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008:29), kata to implement berasal dari kata latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill” yaitu mengisi. Dalam Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29) selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implement”. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan saran (alat) untuk melakukan sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan public, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat reoritis.

Implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut (George Edward III 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi menurut Edward menyatakan bahwa ada 4 (empat) variabel krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, keempat faktor tersebut beroperasi secara saling berinteraksi satu sama lain.

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara silmutan karena antara satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan dengan cara membreakdown atau diturunkan melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

C. Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 9 pasal 18 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Perempuan Papua

Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan pembinaan bidang pemberdayaan perempuan serta melaksanakan perumusan program kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;

3. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komunikasi antar sektor dan lintas sektor dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan;
4. pelaksanaan kajian sosial budaya tentang peranan perempuan secara komprehensif, holistik dan terstruktur;
5. pelaksanaan penyuluhan anti kekerasan terhadap perempuan dan dalam keluarga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga;
6. evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan;
7. pelaksanaan ketatausahaan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berfikir, tertata pada satu jalur yang baik maka dibutuhkan suatu metode.

Menurut W.J.S Poerwadarminta (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalan yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis pula.

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Perempuan, yaitu:

1. Pengembangan Organisasi Perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender.
2. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Partisipasi kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan kampung.
4. Kajian sosial budaya kaum perempuan dalam prespektif budaya Papua untuk berpartisipasi.

Hal-hal lain juga yang nantinya akan berkembang selama penelitian ini berlangsung.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampung Menawi distrik Angkaisera kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian dalam proses atau teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Menyebarkan *kuesioner* (daftar pertanyaan).

Dalam hal ini penulis menyebarkan sejumlah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan (*kuesioner*) yang telah ditentukan kepada masyarakat yang terdiri dari: Ketua dan sekretaris PKK kampung, Pengurus PKK, Anggota PKK, Bapak-Bapak

b. Wawancara mendalam (*In depth Interview*).

Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dari *key Informant* yang dirasa perlu. *Key Informant* tersebut diantaranya terdiri dari:

- Kepala Desa, Aktivis perempuan dan Tokoh-tokoh perempuan serta, Dinas pemberdayaan perempuan kabupaten Kep. Yapen

Wawancara mendalam ini dimaksudkan akan memperkuat informasi yang didapatkan lebih objektif mendalam dan terpercaya.

c. Untuk lebih mengakuratkan data-data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Melakukan observasi di lokasi penelitian. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung di lokasi penelitian.
- 2) Studi kepustakaan. Dalam memperoleh data-data yang mendukung dalam rangka menjadikan penulisan ini mempunyai landasan teoritis, maka penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan.
- 3) Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Dan data ini merupakan data-data pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan peneliitian.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model interaktif, dalam model analisis ini ada tiga komponen yang dianalisis yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman dalam Moleong, 1996:41).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan program keluarga dan masyarakat sejahtera di Kampung Menawi. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, informan kunci, dan informan pelengkap. Hasil penelitian ini akan meliputi: karakteristik informan, pengamatan masyarakat terhadap Partisipasi Perempuan, lebih khusus dalam pengelolaan program keluarga dan masyarakat sejahtera.

Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari berbagai unsur, yaitu: Kepala Kampung, Ketua dan sekretaris PKK kampung, Pengurus PKK, Anggota PKK, Aktivis perempuan dan Tokoh-tokoh perempuan. Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini berbeda-beda, dari informan yang dicantumkan diatas (selain Masyarakat) semuanya telah lulus jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SMA), walaupun ada dari beberapa informan yang mengikuti pendidikan dasar ini tidak sepenuhnya, dalam artian ada beberapa informan yang langsung loncat kelas, dan ikut penyesuaian paket B dan paket C.

B. Pembahasan

Peningkatan peranan dan partisipasi wanita merupakan sebuah topik yang sangat relevan untuk didiskusikan dan diperjuangkan. Sejak era orde baru hingga saat ini peningkatan peranan wanita menjadi sebuah gerakan yang selalu hangat dan menarik untuk kita diskusikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perjuangan itu sebenarnya sudah sejak lama dimulai dan kumandangkan, setidaknya sejak 146 tahun yang lalu, ketika usia RA

Kartini menginjak 12 tahun. Pada saat mana beliau harus mengahiri masa sekolahnya di ELS (Europese Lagere School), karena budaya mengharuskan beliau memasuki usia pingit.

Kita tentu akan sangat terinspirasi, bagaimana seorang Kartini, pada saat itu mampu mengubah pemikiran masyarakat Eropa (Belanda) terhadap cara pandang pada wanita pribumi Indonesia. Sesuatu yang sangat tidak dikenal oleh mereka, kecuali kegelapan dan diskriminasi. Dari kumpulan pemikiran RA Kartini melalui ratusan surat dan tulisan “habis gelap terbitlah terang”, beliau tulus dan kuat menggugat dan memperjuangkan kesempatan dan akses pendidikan bagi kaumnya. Kartini muda sudah sangat paham terhadap ketidakadilan yang mengharu biru kaumnya. Tiadanya hak memilih dan menolak perjodohan, bahkan terhadap poligami, tiadanya kesempatan bersekolah, dan berbagai bentuk ketidakpersamaan hak lainnya. Kondisi tersebut telah melahirkan pemikiran visioner Kartini yang mampu menerobos hingga ke negeri Belanda, menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan kebangkitan nasional saat itu.

Walaupun pemikiran Kartini muda sudah sangat maju, mampu meyakinkan ayah beliau bahkan pemerintah Hindia Belanda, terhadap kesempatan pendidikan bagi Kartini. Kita juga mencatat, ketika pilihan itu sudah sangat terbuka, beliau lebih mendahulukan keluarga. Kartini memutuskan untuk mengesampingkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Belanda atau Betawi (Jakarta), dan menikah dengan K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat (Bupati Rembang saat itu). RA Kartini merencanakan melanjutkan perjuangan itu setelah menikah, antara lain dengan mendirikan Sekolah Khusus bagi kaum perempuan, sebuah impian mulia yang belum sempat beliau tuntaskan. RA Kartini lebih memilih membangun keluarga sebagai basis membangun generasi berkualitas.

Di Indonesia peningkatan peranan dan partisipasi wanita diarahkan untuk mencapai kondisi kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat kita. Kata sejajar dan bermitra merupakan sebuah kata yang menyiratkan persamaan hak saling menghormati dan bekerja sama. Disana tidak ada dominasi, saling menguasai dan pemaksaan kehendak. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam segala sisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pada dunia pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, pada aspek peningkatan derajat kesehatan dan gizi, maupun peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pada dasarnya, peningkatan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat diarahkan bagi

terciptanya kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam membina keluarga maupun dalam peran aktif di masyarakat.

Saat ini kita sudah cukup banyak berbuat untuk meningkatkan peran wanita dalam keluarga. Di bidang ekonomi dan pendidikan anak, misalnya berbagai usaha telah dilakukan, baik melalui penyuluhan maupun bimbingan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pembinaan tumbuh kembang anak balita. Sementara itu, peningkatan peran wanita dalam masyarakat dilakukan melalui peningkatan berbagai aktivitas wanita di berbagai sektor pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang terutama pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera telah berhasil meningkatkan kualitas wanita sehingga peranannya dalam pembangunan lebih nyata. Peranan wanita pada usaha peningkatan pendidikan anak dan remaja antara lain dapat kita lihat pada peran penting mereka pada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

Di bidang pendidikan, makin banyak wanita yang dapat menempuh pendidikan melalui jalur sekolah yang ditunjukkan oleh makin meningkatnya rasio murid wanita terhadap pria pada berbagai jenjang pendidikan. Peningkatan derajat pendidikan wanita tersebut membawa dampak terhadap meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia usaha. Di bidang ketenagakerjaan, ribuan wanita, ibu rumah tangga, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Di bidang hukum dan perundang-undang, kemajuan pesat sudah banyak dicapai oleh bangsa ini. Berbagai produk hukum dan perundangan dengan semangat melindungi hak dan kewajiban wanita dalam segala aspek kehidupan sudah dibuat. Kita dapat menyebutkan berbagai aspek diantaranya menyangkut persoalan perkawinan, perceraian, serta tata cara kerja bagi pekerja wanita, seperti jam kerja malam dan pemutusan hubungan kerja karena menikah, hamil, dan melahirkan. Tentu yang sudah sangat kita kenal terkait produk hukum ini salah satu diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di bidang kesehatan, peran wanita semakin nyata dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Posyandu. Sementara perbaikan derajat kesehatan dan gizi wanita dilakukan terutama melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan menyusui. Pelayanan kesehatan dasar secara teratur diselenggarakan di

Puskesmas dan Posyandu yang dikelola oleh masyarakat, terutama melalui peran penting organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Peran wanita sebagai bidan juga semakin meningkat, dengan ribuan bidan telah disebar pada hampir seluruh desa di Indonesia. Keberadaan Bidan Desa ini sangat vital untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi dan anak, sebagai salah satu target millennium Development Goals (MDGs). Target ini juga merupakan indikator penting peningkatan human development indeks bangsa.

Penurunan angka kematian ibu melahirkan merupakan sebuah tujuan yang sangat penting untuk diwujudkan, karena seluruh denyut masa depan generasi kita berawal dari sini. Kita tentu masih ingat, pahlawan dan sumber inspirasi perjuangan emansipasi wanita kita, RA Kartini, menghembuskan nafas terakhir karena preeklamsia, tepat 4 hari setelah kelahiran putra pertama sekaligus terakhir, pada tahun ke 25 usia beliau. Sebuah usia produktif yang sangat sayang untuk pejuang dan pemikir sebesar beliau. Dan lebih dari dua dasawarsa sepeninggal beliau, penyebab kematian serupa masih menjadi masalah serius yang harus sama-sama kita perhatikan. Kita harus lebih meningkatkan kepedulian kita pada sanak saudara, tetangga, dan teman kita yang memasuki masa-masa kehamilan dan persalinan. Berikan mereka nasehat, support, dan bantuan untuk mampu mengakses pada fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai untuk kesehatan kandungan dan janin mereka.

Dalam kaitan tersebut, kita juga harus kembali meningkatkan peran penting wanita dalam bidang kependudukan dan keluarga sejahtera. Sejak awal wanita merupakan peserta KB (akseptor) aktif dengan angka partisipasi jauh diatas jumlah akseptor pria. Disamping itu wanita juga telah sejak lama berpartisipasi sebagai motivator KB, yang ulet dan handal. Pengaturan kelahiran merupakan jalan terbaik dan entry point penting mewujudkan keluarga berkualitas, sejahtera dan bertartabat.

Saat ini, peran sentral dan vital wanita pada pembangunan nasional, ada pada peran dan fungsi dalam membangun keluarga. Fungsi ini lebih ditekankan pada fungsi ibu dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dalam Islam, yang menempatkan menempatkan posisi wanita sebagai madrasah utama dalam pendidikan di rumah. Ibu, mendapat posisi penting sebagai guru besar pendidikan pertama anaknya.

Saat ini pendalaman pengetahuan dan peningkatan keterampilan bagi para ibu mengenai pendidikan dan pengasuhan anak balita yang baik dan benar dilaksanakan melalui

kelompok-kelompok bina keluarga balita (BKB). Dengan bertambahnya jumlah ibu yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan secara merata, mereka dan keluarganya mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas.

Dan langkah awal yang sangat menentukan dari peran penting wanita khususnya peran ibu dalam mendidik anak, dimulai pada saat pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada sang buah hati. Salam hormat takzim mari kita haturkan untuk segenap para ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada anak-anaknya, karena ASI adalah simbol awal ikatan ibu dengan anaknya. Salam hormat kita juga untuk para ibu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan kejujuran kepada anak-anaknya, dan menjadi sekolah pertama yang dihadapi oleh anak-anaknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi kaum perempuan yang ada di kampung Menawi sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa wanita itu cukup mengurus anak-anak dan menyiapkan makanan untuk keluarga, hal ini terkait dengan kebiasaan atau adat yang berkembang dimana kaum wanita hanya ditugaskan untuk mengurus kebutuhan keluarga, bukan sebagai pencari nafkah ataupun membantu mencari nafkah bagi keluarga.
2. Pengelolaan program peningkatan partisipasi kesejahteraan keluarga bagi kaum perempuan di kampung Menawi sudah baik, hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi wanita dimana program kerjanya bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan membentuk satu kelompok usaha, walaupun tidak sepenuhnya warga perempuan kampung Menawi terlibat aktif sepenuhnya dalam wadah/organisasi ini.
3. Kebiasaan dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di kampung Menawi menjadi penyebab belum terlalu efektifnya atau terbatasnya partisipasi kaum wanita yang ada di kampung menawi, hal ini disebabkan karena masih banyak kaum wanita yang beranggapan tidak wajar apabila kaum wanita turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya pembinaan yang lebih intensif lagi untuk memberikan pengertian kepada para kaum wanita yang ada di Kampung Menawi, untuk dapat meningkatkan partisipasinya, bahwa kaum wanita bukan hanya sebagai pelaksana tugas rumah tangga, tetapi juga wajar untuk bersama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perlu ditingkatkan peran dari organisasi kewanitaan yang ada di kampung Menawi untuk menarik simpati kaum wanita yang belum turut aktif terlibat dalam organisasi tersebut.
3. Perlunya pandangan maju kedepan/pembaharuan terhadap adat dan budaya yang berkembang, bahwa kaum wanita dianggap tabu untuk melaksanakan pekerjaan kaum pria, karena hal ini yang akan menghambat kesetaraan gender bagi kaum wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Van Metter dan Van Horn, 1974. (Dr. solichin abdul wahab, M.A 2008) *analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. edisi ke dua, penerbit PT. bumi Aksara Jakarta
- Alexander Abe. 2006. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi. Jakarta
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Gibson Dkk. 1998. *Organization*. (Terjemahan Dhana Agus) Erlangga. Jakarta.
- Hari Wijaya dan Basri M.J. 2004. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*. Zenith Publisher Yogyakarta.
- Hasan Fachri 2002, *Managemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Harry Hikmat. 2004. *pengaruh Utama Partisipasi Masyarakat*. C.V. Cepruy. Jakarta
- Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK tahun 2005. Direktorat Jendral. *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. Depdagri. Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI; Depok
- Miles dan Hubberman, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gunung Agung, Jakarta
- Notoatmodjo, S. 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Pius Partanto, Dahlan Ali. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola. Surabaya.
- Prof. Dr. Makmur, MSi. 2010. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama. Bandung
- Poerwadarminta. 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama; Jakarta.
- Purwo Santoso, 2003, *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Kampung*, Tim Laper Pustaka Utama Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; Bandung

- Sugiyono Prof. Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta; Bandung
- Suparyogo, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Suharto 2001, *Otonomi Kampung dan Pemberdayaan*, Penerbit Tim Lapera Jakarta.
- Solichin.A.W. 2002. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Stoner dan Frenan.1994 *Manajemen*.Prentice Hall Internasional). New York.
- Timur Mahardika, 2001, *Pendidikan Politik Pemberdayaan Kampung Panduan Praktisi*, Penerbit Tim Lapera Pustaka Utama Jakarta.
- Yayuh. Y. Poernomo. M. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Lappera Pustaka Utama. Jogjakarta.